

HAKIKAT DAN KONSTRUKSI KEILMUWAN EKONOMI ISLAM

Dede Nurohman

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung
dede_rahman@yahoo.com*

Abstrak

Wacana ekonomi Islam hampir selalu menjadi bahan diskusi dalam tataran keilmuan, khususnya pada wilayah epistemologis. Secara istilah, term "ekonomi" dan "Islam" dianggap bertentangan satu sama lain. Kontradiksi tersebut memunculkan pertanyaan apakah ekonomi Islam itu sains atau doktrin? Untuk menjawabnya maka tulisan ini mengelaborasi problem-problem tersebut melalui pemikiran para proponent ekonomi Islam, khususnya Baqir al-Shadr dan Anas Zarga'. Dalam analisisnya, Shadr mengatakan semua sistem ekonomi, baik kapitalis, sosialis maupun Islam, lahir dari doktrin-doktrin yang mengajarkan ekonomi. Doktrin-doktrin itulah yang melahirkan ilmu ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi Islam sejajar dengan ekonomi kapitalis dan sosialis dalam banyak hal, khususnya menyangkut metode atau cara masyarakat menggunakan dan menyelesaikan problem ekonominya. Dalam wilayah metodologis, Zarga' menyatakan bahwa al-Qur'an dan sunnah yang dianggap sebagai sumber normatif ternyata juga menyiratkan asumsi-asumsi deskriptif (positif). Kedua pernyataan ini juga mengendap dalam ilmu ekonomi konvensional. Pendek kata, ia menyatakan bahwa keilmuan itu tidak diukur dari asumsi deskriptifnya yang berakar dari realita empiris saja, tetapi juga asumsi normatif yang menjadi bingkai kerja ilmu tersebut. Sebuah keilmuan, ilmu ekonomi kapitalis, sosialis maupun Islam, merupakan doktrin yang kental dengan asumsi normatif. Dari doktrin itulah yang kemudian dirumuskan teori dan ilmu, setelah mengalami proses kontekstualisasi dengan realita masyarakat.

[Islamic economic discourse was almost always be the subject of discussion on saintific perspective, especially, on epistemology. Terminologically, term “economic” and “islam”, controverse the one and another. This controversy implies a question; do islamic economic is dogma or science? This paper elaborate these problems through ideas of the Islamic economic proponents, especially Muhammad Baqir al-Shadr and Anas Zarqa’. In his analysis, Shadr said that all of economic systems, capitalism, socialism or Islam, born from dogmas about economic. These dogmas arise the economic. Therefore, Islamic economics was same with capitalism and socialism on more thing, especially, connect to a method of society to use and solve his economic problems. On methodology context, Zarqa’ express al-Qur’an and sunnah, considered as source of normative assumptions, it turns out contain implicitly a descriptive assumptions (positive). Both, normative assumptions and descriptive assumptions, were integrate in conventional economic. In short, Zarqa’ explained that a science didn’t be measured from the descriptive assumptions only, that built from empirical reality, but from the normative assumptions, that became a frame work of the science. A science, capitalism, socialism or Islamic economics, was dogma effected by normative assumption as majority. From the dogma, the latter, a theory was be postulated, and a science was be formulated, through process of contextualizing with reality of society.]

Kata kunci: *Ekonomi Islam, Problem Terminologis, Asumsi Deskriptif, Asumsi Normatif*

Pendahuluan

Kehidupan manusia—menurut Marx—dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Sedangkan aspek politik, budaya dan sosial berkembang mengikuti sekaligus dikendalikan oleh siapa yang menguasai faktor produksi. Di Indonesia pada awal krisis dapat dijadikan gambaran bagaimana faktor ekonomi itu menentukan politik. Di sisi lain, terdapat kekuatan lain, yaitu agama. Faktor ini sepanjang sejarah juga mempunyai andil kuat dalam mewarnai peradaban manusia. Dua kekuatan itu diakui oleh pakar ilmu ekonomi, Marshall. Bahkan menurutnya, jika dua

kekuatan tersebut disatukan, kekuatan ekonomi dapat lebih mendominasi daripada agama.¹

Terlepas dari sifat menuduh apakah ini upaya legitimasi lebih dalam ideologi ekonomi konvensional atau penegasan materialisme yang tidak mungkin lagi dilepas dari kehidupan modern, tesis Marshall di atas perlu dievaluasi dari sudut pandang kekuatan agama. Satu sisi dapat diterima bahwa kehidupan manusia modern telah terjerembab dalam nilai-nilai materialisme dan individualisme. Di sisi lain, agama bukannya tidak mungkin “duduk bersanding” dengan kekuatan ekonomi, atau paling tidak menyusupi nilai-nilainya. Idealisme ini, kiranya menemukan signifikansi ketika sistem ekonomi yang berkembang dewasa ini tidak kunjung memberikan keadilan bagi umat manusia. Oleh karena itu, sebagai sebuah tawaran, dapat dipahami kiranya, jika kemudian ekonomi dengan nilai-nilai Islam (ekonomi Islam) muncul berupaya membenahi keadaan.

Wacana ekonomi Islam muncul secara menguat pada sekitar tahun 1960-an. Wacana ini terus bergulir seiring berjalannya waktu dan berkembangnya konsep dan teori-teori hingga sekarang. Namun, seringkali konsep tentang ekonomi Islam masih menjadi polemik di masyarakat. Apa hakikat ekonomi Islam, apakah ia sebuah ilmu (sains) atau sebuah doktrin? Dan bagaimana ia dibangun? Pertanyaan bersifat epistemologis tersebut, dalam tulisan ini, dicoba untuk dijawab. Terjelaskannya problem epistemologis ilmu ekonomi Islam, bukan saja akan menguatkan posisi keilmuannya, tetapi juga akan menjadi fondasi penting bagi perkembangan keilmuan tersebut selanjutnya

Pengertian Ekonomi Islam (Syariah)

Sebelum menguraikan pengertian ekonomi Islam maka penting kiranya memahami tentang apa itu ekonomi dan apa itu Islam atau syariah. Ilmu ekonomi didefinisikan secara beragam, paling populer di antaranya

¹ Dikutip oleh Mahmud Abu Su'ud, *Khuṭūb Ra'īsīyah fī al-Iqtisād al-Islāmī* (Kuwait: Maktabat al-Manār al-Islāmiyyah, 1968), h. 56. Lihat juga, Juhaya S. Praja, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah*, MSI-UII.Net-12/2/2005.

adalah “ilmu yang mempelajari segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang”.² Definisi ini dianggap masih kurang representatif sehingga para ahli ekonomi neo-klasik, seperti Lionel Robbins, mengajukan pengertian lain bahwa inti kegiatan ekonomi adalah aspek “pilihan dalam penggunaan sumberdaya”. Dalam pemilihan ini, lanjutnya, manusia menjumpai masalah kelangkaan (*scarcity*). Dengan demikian, sasaran ilmu ekonomi adalah bagaimana mengatasi kelangkaan itu. Dari situ muncul definisi ilmu ekonomi yang dipegang hingga kini, yaitu “sebuah kajian tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan-tujuan dan alat-alat pemuas yang terbatas, yang mengundang pilihan dalam penggunaannya”.³

Sedangkan pengertian Islam dan syariah sebenarnya berbeda. Islam adalah agama sedangkan syariah adalah aturan-aturan yang ada dalam agama tersebut. Namun dalam konteks ekonomi, kedua istilah tersebut disamakan maknanya.⁴ Syariah diartikan sebagai semua aturan-aturan Allah yang disediakan untuk kesejahteraan manusia. Aturan-aturan ini meliputi aturan tentang akidah, tasawuf dan juga moral (akhlak). Aturan-aturan tersebut menjadi pedoman hidup manusia dalam semua lini kehidupan, ekonomi, politik, budaya dan sosial.⁵ Dari aspek ekonomi, syariah mempunyai aturan dan doktrinnya sendiri yang diyakini dapat

² M. Dawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Cet. I (Yogyakarta: LSAF, 1999), h. 5.

³ *Ibid.*, h. 6-7.

⁴ Istilah “Ekonomi Islam” kadang disamakan dengan istilah “Ekonomi Syariah”. Beberapa kalangan membedakannya. Pada istilah yang pertama, perspektif ilmu ekonominya lebih kuat, sedangkan yang kedua lebih condong pembahasannya pada hukum-hukum syariahnya. Walaupun menggunakan term “Islam”, kata ini juga dimaksudkan bahwa sistem yang digunakannya adalah norma dan prinsip syariah juga. Oleh karena itu, di Indonesia istilah ekonomi Islam lebih populer di lembaga pendidikan-pendidikan umum. Sedangkan istilah “ekonomi syariah” digunakan oleh lembaga pendidikan agama. Namun secara diskursif istilah “ekonomi Islam” lebih populer dari “ekonomi syariah”.

⁵ A. Hanafi, M.A, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 7. Lihat juga Ahmad Zaki Yamani, *Syari’at Islam yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini*, terj. Mahyuddin Syaf, Cet. I (Bandung: Ma’arif, 1974), h. 14.

memberikan kesejahteraan masyarakat. Doktrin yang mengajarkan ekonomi inilah yang kemudian memunculkan konsep ekonomi Islam.

Beberapa definisi ekonomi Islam banyak diungkap oleh para proponen ekonomi Islam secara lebih detail dan kontekstual. M. A Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁶ Hampir senada dengan itu, Khursyid Ahmad memahami bahwa ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis yang mencoba menelaah problem ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan problem itu dari perspektif Islam.⁷ Sementara M. Nejatullah Shiddiqi mengatakan ekonomi Islam adalah “para pemikir Muslim” yang merespon tantangan-tantangan ekonomi pada masanya, yang dalam usahanya itu mereka dibantu oleh al-Qur’an, sunnah dan juga penalaran dan pengalaman.⁸

Pengertian yang disampaikan Mannan secara tegas mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah ilmu. Lain dengan Ahmad, ekonomi Islam dipandanginya sebagai sebuah usaha sistematis. Sedangkan Shiddiqi menyatakannya sebagai sebuah respon para pemikir Muslim terhadap problem ekonomi di masyarakatnya. Beberapa pengertian yang disampaikan para pakar ekonomi Islam tersebut, hanya Mannan yang menyatakan secara eksplisit bahwa ekonomi Islam sebuah ilmu. Sementara yang lainnya, jika diamati lebih jauh, khususnya pada dimensi fungsionalnya maka sesungguhnya dapat dikatakan bahwa secara implisit mereka menyejajarkan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Dan ini berarti ekonomi Islam juga sebagai sebuah ilmu untuk memecahkan permasalahan. Dan keilmuan ini diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an dan hadis, yang menjadi dasar dari perspektif Islam.

⁶ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terj. Tim IKAPI, Cet. I (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19.

⁷ Diambil dalam M. Umar Chapra, *What is Islamic Economics* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1996), h. 33.

⁸ M. Nejatullah Shiddiqi, *History of Islamic Economic Thought* (London: Mansell, 1992), h. 69.

Problem Terminologis

Dalam tradisi keilmuan Barat, sebuah ilmu pengetahuan dibangun dari asumsi-asumsi deskriptif (positif). Sebuah pengetahuan dianggap sebagai ilmu jika ia dibangun oleh realitas-realitas objektif yang bersifat empiris dan dapat dibuktikan secara ilmiah dan melampaui proses verifikasi. Sebaliknya, jika asumsi yang dibangun tidak melalui proses ilmiah dan hanya berisi nilai-nilai (normatif) tidak dianggap sebagai ilmu. Karena keilmuan bersifat bebas nilai maka asumsi-asumsi yang membangunnya bersifat rasional, empiris dan objektif.⁹

Sementara asumsi normatif tidak bisa dijadikan sebagai dasar bagi terbangunnya keilmuan sebab bersifat subjektif, irasional dan mengandung nilai-nilai yang mengandung kepentingan.¹⁰ Pernyataan normatif tidak bisa dipaparkan sebagai kebenaran (sesuai dengan realita) atau kesalahan. Pernyataan-pernyataan ini dapat diterima atau ditolak jika pernyataan-pernyataan itu sesuai dengan nilai-nilai tertentu yang melingkupinya.¹¹ Uraian di atas memberikan pemahaman kiranya bahwa tradisi keilmuan yang dikembangkan Barat berdasarkan pada asumsi-asumsi yang dapat diukur, diverifikasi dan dibuktikan secara empiris. Pernyataan atau fenomena harus dibebaskan untuk ditafsirkan

⁹ Sebagai contoh, “meningkatkan curah hujan mengakibatkan meningkatnya produksi pertanian”, atau “di Mars ada kehidupan”. Ini merupakan pernyataan deskriptif. Pernyataan tersebut mengasumsikan adanya hubungan antara meningkatnya curah hujan dengan meningkatnya hasil pertanian. Lihat Muhammad Anas Zarqa’, “Islamization of Economics: Concept and Methodology”, dalam J.KAU: Islamic Economics, Vol. 16, No. 1, 1424/2003, h. 3-42. Lihat pula tulisannya, “Methodology of Islamic Economics”, dalam Ausaf Ahmad dkk (ed.), *Lectures on Islamic Economics* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1992), h. 49-58.

¹⁰ Sebagai contoh “mengajukan pengunduran diri lebih baik daripada menjadi karyawan di perusahaan kolap” atau “berkata benar merupakan kewajiban”. Contoh ini merupakan pernyataan normatif. Ia berisi nilai-nilai subjektif. “Pengunduran diri” seseorang belum tentu bisa diterima orang lain. “Berkata benar” bisa menjadi prinsip sikap seseorang yang mungkin berbeda dengan yang lain. Oleh karena itu, pernyataan normatif merupakan pernyataan sikap dan pilihan-pilihan seseorang terhadap masalah atau keadaan tertentu. Dalam keadaan yang tidak sama mungkin seseorang memilih atau bersikap “tetap menjadi karyawan” atau “bicara bohong”.

¹¹ *Ibid.*, h. 55.

dan “ditelanjangi” untuk dicari kesesuaiannya dengan logika dan bukti-bukti empiris. Oleh sebab itu fenomena harus lepas dari ikatan-ikatan nilai yang melingkupinya. Jika tidak bisa maka bukan keilmuan. Dengan demikian, agama tidak dianggap sebagai sebuah keilmuan. Karena agama menuntut masyarakat untuk melakukan nilai-nilai tertentu sehingga pernyataan-pernyataannya tidak bisa diuji secara ilmiah dan diverifikasi kebenarannya secara akali.

Lebih jauh, apa yang dijelaskan para proponent ekonomi Islam tentang definisi mereka sebagai sebuah ilmu, oleh banyak kalangan tidak bisa diterima. Karena secara istilah itu sendiri memuat problem terminologis. Istilah “ekonomi” dan “Islam” lahir dan berangkat dari akar yang berbeda. ”Ekonomi”, lahir dari pemikiran manusia dalam lingkungan positivistisme, di mana kebenaran diukur dari bukti-bukti empirik dan oleh karenanya mengandung pernyataan-pernyataan deskriptif (empiris). Sementara ”Islam” lahir dan dicipta oleh Zat yang tidak tampak (Tuhan: keyakinan), di mana kebenaran diukur melalui nilai-nilai spiritual sehingga banyak mengandung pernyataan-pernyataan normatif.

Ilmu ekonomi adalah sebuah keilmuan yang dibangun dari realitas-realitas yang terjadi di masyarakat yang dapat diukur, diuji dan diverifikasi secara ilmiah sehingga dapat dijadikan sebagai pencari kebenaran ilmiah. Keilmuan ini sepanjang sejarah telah terus-menerus dijadikan sebagai alat memahami realitas dan menyelesaikan problem-problem ekonomi masyarakat. Ekonomi sebagai sebuah ilmu diperoleh melalui pengamatan (empirisme) terhadap gejala sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengamatan yang dilakukan kemudian digeneralisasi melalui premis-premis khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Pada tahap ini, ilmu ekonomi menggunakan penalaran yang bersifat kuantitatif.

Perubahan dan keajegan yang diamati dalam sistem produksi dan distribusi barang dan jasa kemudian dijadikan sebagai teori-teori umum yang dapat menjawab berbagai masalah ekonomi. Sebagai sebuah contoh

dapat dilihat dari teori permintaan (*demand*) dalam ilmu ekonomi yang berbunyi “apabila permintaan terhadap sebuah barang naik maka harga barang tersebut secara otomatis akan menjadi naik”. Teori tersebut diperoleh dari pengalaman dan fakta di lapangan yang diteliti secara konsisten oleh para ahli ekonomi. Berdasarkan cara kerja yang demikian, penemuan teori-teori ilmu ekonomi dikelompokkan ke dalam *context of discovery*.¹²

Berbeda dengan hal itu, ”Islam” diperoleh melalui penelusuran langsung terhadap al-Qur’an dan hadis oleh para fuqaha. Melalui kaidah-kaidah *usuliyyah*, mereka merumuskan beberapa aturan yang harus dipraktikkan dalam kehidupan ekonomi umat. Rumusan-rumusan tersebut didapatkan dari hasil pemikiran (*rasionalisme*) melalui logika deduktif. Premis mayor yang disebutkan dalam wahyu selanjutnya dijabarkan melalui premis-premis minor untuk mendapatkan kesimpulan yang baik dan benar. Dengan demikian, ”Islam atau syariah” menggunakan penalaran yang bersifat kualitatif. Islam atau syariah sebagai sistem nilai bekerja melalui *context of justification*.¹³ Ia menjustifikasi sebuah fenomena, bukannya meneliti fenomena.

Dengan nada yang hampir sama, Nienhaus, mempertanyakan apakah ekonomi Islam sebuah doktrin, yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip yang tidak dapat ditolak dan mengatur hal-hal *sepele*, atau sebuah ilmu, yang secara praksis mengarahkan dan menggunakan metode ilmiah untuk menjelaskan fenomena-fenomena ekonomi di masyarakat?¹⁴ Pertanyaan ini muncul karena memang ekonomi Islam dibangun oleh dua istilah yang satu sama lain saling berlawanan. Yang satu bersifat deskriptif dan lainnya normatif. Dalam perubahan dinamis sebagai hasil dialog konstruktif antara masyarakat dan pasar, ekonomi Islam sebagai doktrin,

¹² Lihat artikel Saleh Partaonan Daulay, *Mempertegas Posisi Ekonomi Islam diantara Ekonomi Konvensional dan Fiqh Mu’amalat*, diakses tanggal 22 Agustus 2005.

¹³ *Ibid.*, h. 22.

¹⁴ Volker Nienhaus, “Islamic Economics: Dogma or Science”, dalam Kay hafez (ed.), *The Islamic world and the West*, terj. Mary Ann Kenny (Leiden: Brill, 2000), h. 86-99.

apakah bisa melenturkan doktrin-doktrin mengikuti perkembangan itu? Di sisi lain, jika ia sebagai ilmu, apakah ia bisa membuat rumusan teoritis yang solutif dan bisa menyelesaikan problem ekonomi masyarakat? Problem terminologis tersebut mencerminkan bahwa pada dataran epistemologis ekonomi Islam belum selesai.

Hakikat Ekonomi Islam

Pembahasan tentang terminologis adalah pembahasan tentang “sesuatu” itu didefinisikan agar bisa dipahami secara konseptual. Untuk mengetahui “sesuatu” itu maka perlu dilacak hakikat atau substansi dari “sesuatu” tersebut. Dalam dunia filsafat, kajian yang membicarakan tentang hakikat sesuatu itu masuk dalam dimensi ontologis. Dalam konteks ekonomi Islam, apa hakikat ekonomi Islam tersebut?

Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr, ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan dengan penjelasan terperinci perihal kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwanya, fenomena-fenomena lahiriahnya, serta hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena tersebut dengan sebab-sebab umum yang memengaruhinya.¹⁵ Penjelasan terperinci mengenai perihal kehidupan ekonomi tersebut dalam setiap dekade sejarah memiliki karakteristiknya sendiri. Setiap masyarakat memiliki problem ekonomi sendiri-sendiri dan mempunyai cara bagaimana menyelesaikan problem-problem tersebut. Sebuah peradaban manusia dalam komunitas tertentu yang tercatat menjadi pengalaman dalam menyiasati masalah ekonominya itulah yang dimaksud Shadr sebagai ilmu ekonomi. Masyarakat Muslim yang telah membangun peradaban sekitar 14 abad yang lalu mempunyai cara atau metode yang dipilih dan diikuti masyarakat tersebut serta digunakan untuk memecahkan problem ekonomi praktisnya, berbeda dengan masyarakat non Muslim.

Masyarakat Muslim mendasarkan penyelesaian problem itu pada prinsip dan nilai-nilai Islam yang mereka jadikan pandangan dan

¹⁵ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, terj. Yudi (Jakarta: Zahra Publishing House, 2008), h. 61.

pedoman hidupnya. Oleh karena itu, menurut Shadr, ekonomi Islam itu adalah sebuah doktrin. Melalui doktrin Islam dan pengalaman hidup masyarakat dalam mengaktualisasikan doktrin tersebutlah terbangun sebuah peradaban. Atas dasar ini, mustahil dibayangkan masyarakat tanpa doktrin ekonomi.¹⁶ Sebab setiap masyarakat yang menjalankan proses produksi dan distribusi barang-barang kebutuhan harus memiliki sebuah metode yang dengannya mereka dapat menggerakkan aktivitas-aktivitas perekonomian tersebut.

Masyarakat Eropa dalam sepanjang peradabannya, khususnya dimulai sejak terbitnya buku, *An Inquiry Into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*-nya Adam Smith, telah menggunakan doktrin kapitalisme dalam masyarakatnya. Misalnya, doktrin tentang *laissez faire*, yang membebaskan pasar bekerja dengan sendirinya. Dalam tulisannya Smith mengatakan, bukanlah karena sikap kasih sayangnya tukang roti, pembuat anggur dan tukang jagal, kita bisa makan, malam ini, tetapi karena penghormatan mereka terhadap kepentingannya sendiri dan keluarganya.¹⁷ Selain itu, Smith juga menegaskan bahwa dengan mengarahkan usahanya pada suatu cara untuk menghasilkan nilai yang mungkin paling besar, individu hanya bermaksud meraih kepentingannya, dan seperti halnya dalam berbagai kasus lain, usaha melakukan hal itu diarahkan oleh sebuah tangan tak terlihat pada sebuah tujuan yang bukan merupakan bagian dari maksudnya. Dengan mencari kepentingannya sendiri ia berarti mendukung kepentingan masyarakat secara lebih efektif dibandingkan dengan yang menjadi tujuannya.¹⁸ Semuanya itu adalah doktrin kapitalisme yang mengajarkan tentang model ekonomi pasar, melahirkan ideologi liberalisme dan individualisme.

Demikian juga dalam ekonomi sosialis, doktrin-doktrin juga

¹⁶ *Ibid.*, h. 65.

¹⁷ Adam Smith, *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of The Nation*, (New York: The Modern Library, 1776), h. 423. Lihat juga dalam Manuel G Velasquez, *Business Ethics, Concepts and Cases* (New Jersey: Prentice-Hall, 1998), h. 172-173.

¹⁸ *Ibid.*, h. 178.

melandasi model ekonomi. Manusia—menurut Marx—harus mampu mewujudkan sifat mereka dengan mengembangkan potensi ekspresi diri secara bebas dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Untuk itu, manusia harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan produktif dan menguasai apa yang mereka hasilkan. Namun, sistem ekonomi kapitalis telah membuat manusia teralienasi.¹⁹ Menurutny, pemerintah diadakan untuk melindungi dan menjamin kebebasan dan keadilan serta memberikan akses lebih luas bagi masyarakat untuk menguasai sektor-sektor produksi. Pemerintah bukannya mesin yang digerakkan oleh para penguasa yang disetir oleh kelompok-kelompok pemegang sektor produksi. Jika ini terjadi, pemerintahan menjadi tidak berfungsi, pemerintah telah mengorbankan rakyat untuk kepentingan individu penguasanya lantaran mereka sejatinya dikendalikan oleh orang-orang kaya (borjuis).²⁰ Apa yang diungkap Marx ini juga merupakan doktrin ekonomi sosialis yang berbeda dengan doktrin kapitalis. Doktrin ini menekankan pada kesejahteraan bersama tanpa adanya penguasaan sektor ekonomi pada pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan golongan lemah tereksplotasi.

Doktrin-doktrin itu, baik kapitalisme maupun sosialisme, menjadi

¹⁹ Manusia, menurut Marx, teralienasi pada empat keadaan. *Pertama*, pengasingan para pekerja dengan hasil usahanya. Bahkan hasil itu digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan mereka. *Kedua*, pengasingan para pekerja dari aktivitasnya sendiri. Pasar kerja memaksa orang-orang memperoleh penghidupan dengan menerima pekerjaan yang tidak memuaskan, tidak mampu memberikan pemenuhan, dan dikendalikan oleh pilihan orang lain. *Ketiga*, pengasingan mereka dari diri mereka sendiri dengan menanamkan pandangan keliru atas apa yang mereka butuhkan dan inginkan. *Keempat*, pengasingan mereka dengan golongan mereka sendiri melalui penciptaan kelas-kelas sosial yang bertentangan dan tidak sederajat serta menghancurkan komunitas dan hubungan solidaritas. Masyarakat dipisahkan menjadi kelas borjuis, orang-orang kaya pemegang sektor produksi, dan kelas proletar, orang-orang miskin yang sebagian pekerja yang hidup di bawah roda-roda industri. Lihat Karl Max and Frederich Engels, *Manifesto of The Communist Party*, (New York: International Publisher, 1884), h. 48. Lihat juga dalam Velasquez, *Business...*, h. 181-182.

²⁰ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 81-82.

pedoman bagi masyarakat untuk dijadikan sebagai metode memecahkan problem ekonominya. Kedua doktrin itu, kemudian dijadikan fondasi terbangunnya gagasan-gagasan. Kecenderungan umum dikonstruksi dan melahirkan teori-teori. Dari situ terciptalah sebuah ilmu ekonomi yang kapitalisme atau sosialisme. Jadi, lahirnya ilmu ekonomi kapitalis itu dari doktrin kebebasan individu dalam membiarkan kepentingan pribadinya. Demikian juga ilmu ekonomi sosialis ditelorkan dari doktrin tentang kebersamaan dan pembelaan terhadap kaum buruh.²¹

Ekonomi Islam, oleh karenanya, merupakan doktrin. Ia mempunyai pandangan hidup sendiri tentang bagaimana menjalankan dan menyelesaikan problem ekonomi umatnya. Sejak zaman Nabi Saw, peristiwa dan fenomena yang terjadi dalam dunia Islam tidak lepas dari doktrin ini. Misalnya tentang haramnya riba. Al-Qur'an dan hadis sangat tegas melarang Muslim melakukan cara-cara ribawi dalam perilaku ekonominya. Doktrin tentang riba itu membutuhkan penyegaran dalam pemahamannya mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat sekarang. Dalam konteks sekarang, menurut Anas Zarqa, riba diharamkan dalam sebuah pinjaman didasarkan pada dua tujuan. *Pertama*, agar meningkatnya stabilitas ekonomi, dengan itu diharapkan mengurangi fluktuasi ekonomi pada tingkat mikro dan makro ekonomi karena bunga yang didasarkan pada pembiayaan akan meningkatkan fluktuasi. Dan *kedua*, agar dapat merealisasikan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam memanfaatkan sumber-sumber daya di bawah kondisi tertentu.²²

Maka tak aneh bila Shadr mengatakan bahwa keilmuan ekonomi Islam sedang dalam proses pembentukan. Doktrin-doktrin ekonomi Islam yang dipraktikkan secara historis dalam masyarakat sepanjang sejarah yang mengedepankan keseimbangan antara dimensi spiritualis dan materialis dewasa ini, sedang mulai dikaji dan dirumuskan menjadi sebuah kajian

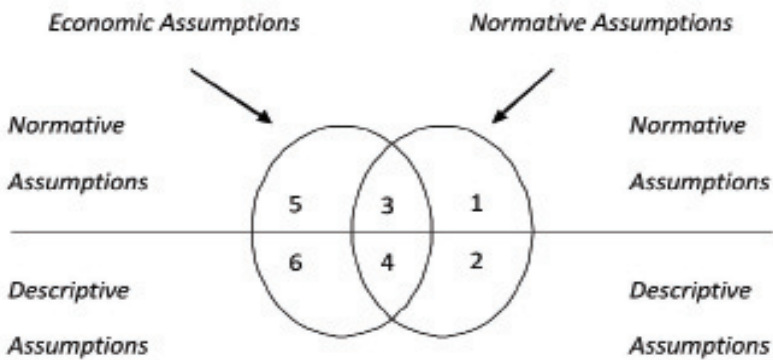
²¹ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk...*, h. 64.

²² Muhammad Anas Zarqa', "Islamization of Economics: Concept and Methodology", dalam J.KAU: *Islamic Economics*, Vol. 16, No. 1, 1424/2003, h. 13.

dan ilmu pengetahuan.²³

Konstruksi Keilmuan Ekonomi Islam

Dalam tataran metodologis, keilmuan ekonomi Islam juga dibangun tidak saja oleh asumsi-asumsi normatif sebagai sebuah doktrin, namun juga dikonstruksi oleh asumsi-asumsi yang bersifat deskriptif atau positif yang empiris. Menurut Zarqa, terdapat asumsi normatif dan deskriptif dalam al-Qur'an dan hadis yang berbicara tentang ekonomi. Dalam penjelasannya, ia membuat diagram (peraga) seperti di bawah ini:



Lingkaran sebelah kiri dalam gambar di atas merupakan pernyataan-pernyataan ekonomi, dan lingkaran sebelah kanan merupakan pernyataan-pernyataan Islam. Kedua lingkaran tersebut dibagi dua dengan garis lurus horisontal yang memisahkan pernyataan-pernyataan normatif (bagian atas garis) dan pernyataan-pernyataan deskriptif (bagian bawah garis).

Dalam gambar tersebut terdapat 6 kelompok pernyataan yang berbeda dan dinomori dari 1 sampai dengan 6. Kelompok 1 memuat pernyataan normatif Islam (wahyu). Kelompok 2 memuat pernyataan deskriptif Islam (wahyu). Kelompok 3 dan 4 memuat keduanya, Islam dan ekonomi, di mana kelompok 3 mewakili pernyataan normatif yang didukung oleh Islam dan ilmu ekonomi, sedangkan kelompok 4 mewakili pernyataan deskriptif Islam dan sekaligus pernyataan deskriptif ekonomi.

²³ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk ...*, h. 61.

Kelompok 5 memuat pernyataan normatif ekonomi yang tidak terdapat dalam wahyu dan tidak dapat disimpulkan dari teks-teks syariah yang ada. Kelompok ini merupakan nilai-nilai yang dimiliki oleh ilmu ekonomi saja. Terakhir kelompok 6 memuat pernyataan deskriptif ilmu ekonomi.²⁴

Uraian lebih detail dari gambar di atas guna mengetahui otoritas wilayahnya sendiri dari masing-masing kelompok tersebut, Zarqa' mengelompokkannya dalam 3 bagian.

Asumsi Normatif Islam (Kelompok 1 dan 3)

Dalam wilayah ini banyak terdapat teks-teks syariah yang disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah bersifat otoritatif. Karena semua perintah dan larangan syariah (dalam berbagai tingkatannya, kewajiban, anjuran atau larangan keras) adalah normatif. Asumsi normatif tersebut tidak langsung menunjuk pada ekonomi secara khusus, seperti perintah Tuhan "*Janganlah kamu palingkan mukamu dari manusia, dan janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan angkuh*".²⁵ Asumsi ini merupakan asumsi normatif Islam yang bersifat umum. Sementara asumsi normatif Islam yang berbicara ekonomi masuk dalam kelompok 3, sebagaimana dalam ayat, "*Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari perbuatan riba*"²⁶ atau "...dan tunaikanlah *zakat*".²⁷ Norma-norma tersebut mengatur sistem ekonomi Islam yang masuk dalam kelompok ini (1 dan 3).

Sementara pada kelompok 3 ini, dari sudut pandang ekonomi modern muncul pertanyaan, apakah ada asumsi normatif Islam yang juga dicakup oleh para ekonom? Sepintas lalu, asumsi-asumsi tersebut tampak secara praktis tidak ada karena ekonomi modern selalu menghindar dari

²⁴ *Ibid.*, h. 12. Lihat pula penjabaran Syamsul Anwar dalam "Menggagas Paradigma Epistemologi Keilmuan Fakultas Syari'ah dalam Bingkai UIN", *Makalah*, Seminar Sehari Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hotel Saphir, 26 Maret 2005, h. 9-11.

²⁵ QS. Luqmān: 18.

²⁶ QS. Al-Baqarah: 278.

²⁷ QS. Al-Baqarah: 110.

asumsi-asumsi normatif. Tetapi, ternyata ekonomi modern tidak sanggup melepaskan diri dari dimensi normatifnya. Misalnya, masalah efisiensi produksi, secara umum dipahami usaha mencapai produktivitas yang tinggi dengan biaya sekecil-kecilnya, merupakan satu isu penting bagi para ekonom modern. Ini merupakan kaidah normatif meskipun terkadang bersifat implisit. Hal ini, sesungguhnya satu level dengan konsep Islam tentang larangan melakukan *tabdhīr* dan *isrāf*. Konsep ini mengisyaratkan asumsi normatif “tidak adanya efisiensi produksi tak lain merupakan bentuk *tabdhīr* (menyia-nyikan barang)”. Ada juga konsep *ḥifẓ al-māl* yang merupakan satu dari lima tujuan utama syariah.²⁸

Asumsi Deskriptif Islam (Kelompok 2 dan 4)

Asumsi-asumsi ini menjelaskan sebuah realitas, hubungan antarvariabel atau mengklasifikasi fakta-fakta dalam keadaan tertentu. Beberapa contoh asumsi-asumsi non ekonomi (kelompok 2) tersebut di antaranya; ketika Tuhan memfirmankan QS. al-Naḥl: 68-69 tentang madu, bahwa di dalamnya terdapat obat bagi manusia:

Artinya: “Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah: buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan”

Ini merupakan pernyataan deskriptif yang menunjukkan hubungan antara penggunaan madu dengan pengobatan penyakit tertentu. Sebuah pernyataan yang masuk dalam realitas ilmu farmasi (pengobatan). Masih banyak lagi ayat-ayat yang berisi pernyataan sejenis.²⁹

²⁸ Muhammad Anas Zarqa, *Islamization...*, h. 13.

²⁹ Dalam al-Baqarah (2): 286 diungkap “*Wabai Tuhan kami, janganlah Engkau menghukumi kami ketika kami lupa atau melakukan kesalahan*”. Ayat ini merupakan sebuah permohonan yang mengindikasikan fakta bahwa terdapat sisi kerelaan untuk berbagai tipe kelupaan yang dapat dihindari, oleh karena itu tidak ada penghukuman lantaran sifat pemaaf Tuhan atas perbuatan mereka. Pernyataan tersebut masuk dalam wilayah ilmu

Sementara itu, asumsi deskriptif Islam yang berkaitan dengan ekonomi (kelompok 4), dapat dilihat di antaranya; Tuhan mengatakan dalam QS. al-‘Alaq: 6-7 surat pertama yang diwahyukan:

*“Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup.”*⁵⁰

Dia juga berfirman dalam QS. al-Shura: 27:

*Artinya: “Dan Jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat.”*⁵¹

Terdapat juga beberapa hadis yang menghubungkan kesejahteraan atau kekayaan dengan sikap melampaui batas, sebagaimana sabda Nabi Saw: *“Ambillah inisiatif untuk berbuat yang baik, atau jika tidak, kamu akan menunggu kemiskinan yang membuatkanmu lupa berbuat baik atau menjadi kaya yang membuatmu melampaui batas”*.³² Ini merupakan pernyataan ekonomi deskriptif yang menghubungkan kemakmuran dan kekayaan dengan sikap melampaui batas. Dan masih banyak lagi ayat atau hadis yang berisi pernyataan-pernyataan Islam yang berkaitan dengan ekonomi, yang masuk dalam kelompok 4.³³

psikologi (jiwa). Contoh lain dalam surat yang sama ayat 166, Tuhan mengatakan, *“... ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya...”*. Dalam surat al-‘Araf (7): 75, Tuhan berfirman tentang Nabi Saleh AS, *“Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya Berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka...”*. Dalam surat al-‘Ahzab (33): 67 juga disebutkan, *“Dan mereka berkata:”Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami Telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar).”* Ayat-ayat tersebut, dan ayat-ayat lain sejenis yang tidak disebutkan, menekankan pentingnya pengklasifikasian masyarakat; pemimpin dan pengikut ketika dalam situasi atau kebijakan-kebijakan baru. Ini merupakan pernyataan deskriptif yang masuk dalam ranah sosiologi.

⁵⁰ QS. al-‘Alaq: 6-7.

⁵¹ QS. al-Shūrā: 27.

³² Diriwayatkan al-Tirmīdhī, yang digolongkannya sebagai hadis sahih. Dinyatakan juga oleh al-Nawawī dalam *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*.

³³ Dalam QS. ‘Alī ‘Imrān: 14-15, Tuhan berkata: *“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*

Asumsi Deskriptif Ekonomi (Kelompok 6)

Kelompok ini memuat pernyataan deskriptif ekonomi. Contoh dari pernyataan ini, meskipun pendapat para ekonom bermacam-macam, namun terdapat konsep yang disepakati secara mayoritas. Beberapa konsep tersebut tentu saja berupa nilai-nilai Barat. Satu misal, hukum Engle (pakar statistik Jerman) yang menyatakan bahwa proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan mengurangi pertumbuhan dalam pendapatan yang sama.

Sedangkan untuk kelompok 5, yang merupakan pernyataan-pernyataan normatif ilmu ekonomi dan merupakan postulat-postulat (praanggapan-praanggapan) yang khas ilmu ekonomi konvensional dapat disisihkan karena tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan sunnah, apalagi yang berlawanan. Namun, hal itu dapat saja diganti atau diadaptasi dengan kelompok 3, asalkan pergantian itu dapat diharapkan menimbulkan 2 perubahan dalam kandungan kelompok 6, yaitu; (1) revisi terhadap kategori-kategori yang semula didasarkan pada kelompok 5, dan (2) penambahan kategori baru (mempertegas kategori-kategori yang belum mendapat perhatian cukup) yang diambil dari kelompok 3, yaitu nilai-nilai dan praanggapan-praanggapan Islam.³⁴

Dari gambaran tentang 6 kelompok dan penjelasannya di atas, setidaknya hubungan antara Islam dan ekonomi dapat disimpulkan bahwa Islam secara prinsip adalah agama petunjuk (*hudan*) yang tujuan utamanya adalah menyediakan pernyataan-pernyataan normatif, seperti hukum syariah yang memerintahkan apa yang harus dikerjakan dan apa yang

Katakanlah: "Inginlah Aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?" Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya. dan (mereka dikaruniai) istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya." Ayat ini terdiri dari 2 pernyataan deskriptif; kecintaan manusia terhadap kekayaan tidak terbatas dan kepercayaan terhadap balasan Tuhan di akhirat mengurangi kecintaan manusia terhadap kekayaan.

³⁴ Muhammad Anas Zarqa', *Islamization...*, h. 18. Lihat analisisnya Syamsul Anwar, *Menggagas Paradigma...*, h. 11.

mesti ditinggalkan. Atau pernyataan-pernyataan yang mengungkapkan pilihan-pilihan normatif satu kondisi dari kondisi lainnya. Tetapi Islam juga memberikan perhatian pada variabel-variabel melalui beberapa pernyataan deskriptif yang masuk dalam beberapa wilayah disiplin akademik, seperti ekonomi, sosiologi dan psikologi.

Sebaliknya, melalui teori tersebut, ilmu ekonomi konvensional juga tidak terlepas dari pernyataan-pernyataan normatif, di samping pernyataan-pernyataan deskriptif. Dan ini, termasuk juga untuk keilmuan lainnya, sosial, politik, sejarah, psikologi, dan sebagainya. Apa yang dilegitimasi sebagai keilmuan yang sarat bebas nilai, pada hakikatnya juga tidak bisa lepas dari nilai. Bahkan menurut Sal Restivo, nilai-nilai yang membangun keilmuan modern lahir dari sistem sosial yang cacat. Ia diciptakan sebagai mesin eksploitasi sistem kapitalisme. Berkedok perdagangan bebas, globalisasi, keterbukaan pasar, dan sebagainya, tetapi nilai-nilai yang melatari adalah nilai-nilai yang kontradiktif dengan nilai-nilai demokrasi, kualitas hidup manusia dan juga kelangsungan hidup bumi dan isinya.³⁵

Dari pepaduan yang tergambar dalam peraga di atas, dapat mengerucutkan pemahaman tentang ilmu ekonomi Islam. Pernyataan-pernyataan normatif ekonomi yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah (sebagaimana terlihat dalam kelompok 3) menjadi aturan yang mbingkai ilmu ekonomi Islam. Ia merupakan postulat-postulat Islam. Di antara isi kandungan dalam kelompok ini adalah ketentuan-ketentuan hukum dan kaidah-kaidah sistem ekonomi Islam.³⁶ Meskipun demikian, kelompok 4 (pernyataan-pernyataan deskriptif ekonomi Islam), menjadi elemen penting bagi ilmu ekonomi Islam. Jadi, ilmu ekonomi Islam terbentuk dari pernyataan-pernyataan normatif Islam tentang ekonomi, di satu pihak, dan dari pernyataan-pernyataan deskriptif Islam tentang

³⁵ Sal Restivo, "Modern Science as a Social Problem", dalam <http://islamlib.com/?site=1&aid=279&cat=content&cid=11&title=sains-islam-dan-revolusi-ilmiah>, diakses tanggal 11 Oktober 2012.

³⁶ Syamsul Anwar, *Menggagas Paradigma...*, h. 10.

ekonomi, di pihak lain. Kedua hal ini dapat berkembang sesuai konteks, asalkan tidak melanggar norma Islam secara umum. Dengan demikian, ilmu ekonomi sah menjadi sebuah ilmu.

Dalam wacana posmodernisme, Foucault menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dikontrol oleh kekuatan-kekuatan dominan, baik politik, ekonomi maupun agama.³⁷ Melalui penguasaan, "kebenaran" ditentukan. Suatu negara, komunitas masyarakat atau sebuah peradaban tertentu sepanjang sejarah melalui kekuatannya dalam mengatur mampu menetapkan dan memaksakan "kebenaran." Oleh karena itu, tidak ada keilmuan (sains) yang netral, semua mengandung kepentingan-kepentingan.³⁸

Oleh karena semua keilmuan bermuatan ideologis, sebagaimana ekonomi sosialis mengandung ideologi marxis dan ekonomi *mainstream* mengandung ideologi kapitalis (pasar bebas) maka sesungguhnya kedua keilmuan ekonomi tersebut pada dasarnya juga mengandung asumsi-asumsi normatif dan asumsi-asumsi deskriptif. Asumsi-asumsi normatif itulah yang diambil dari doktrin-doktrin ideologi. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak bisa dianggap sebagai sebuah doktrin semata. Pernyataan-pernyataan deskriptif yang ada di dalamnya menunjukkan bahwa keilmuan ekonomi Islam harus disejajarkan dengan keilmuan ekonomi sosialis maupun kapitalis. Dan menganggap keilmuan ekonomi Islam sebagai sesuatu yang doktrinal tampaknya terlampau subjektif.

Kesimpulan

Wacana ekonomi Islam memang menjadi isu hangat akhir-akhir ini. Bersamaan dengan berkembangnya konsep dan teori-teorinya, masih saja menyisakan keraguan dan problem. Di antaranya, problem epistemologis yang muncul dari kontradiksi terminologis mengenai konsep ekonomi

³⁷ Michael Foucault, *Archeology of Knowledge and The Discourse of Language* (New York: Pantheon Books, 1972), h. 41.

³⁸ Nur Syam, *Model Analisis Teori Sosial* (Surabaya: CV Putra Media Surabaya, 2009), h. 244.

Islam itu sendiri, yang menyanggah asumsi normatif dan deskriptif. Implikasi selanjutnya pada penggugatan apakah ekonomi Islam sebuah doktrin atau ilmu.

Melalui penelusuran secara mendalam, Shadr mengatakan bahwa semua sistem ekonomi, baik kapitalis, sosialis maupun Islam, lahir dari doktrin-doktrin yang mengajarkan tentang ekonomi. Doktrin-doktrin itulah yang melahirkan ilmu ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi Islam sejajar dengan ekonomi kapitalis dan sosialis dalam banyak hal, khususnya menyangkut metode atau cara masyarakat menggunakan dan menyelesaikan problem ekonominya.

Secara metodologis pun eksistensi keilmuan ekonomi Islam dipaparkan secara mendasar oleh Zarqa. Ia menyatakan bahwa al-Qur'an dan sunnah yang dianggap sebagai sumber normatif ternyata juga menyiratkan asumsi-asumsi deskriptif (positif). Kedua pernyataan ini juga mengendap dalam ilmu ekonomi konvensional. Pendek kata, ia menyatakan bahwa keilmuan itu tidak diukur dari asumsi deskriptifnya yang berakar dari realita empiris saja tetapi juga asumsi normatif yang menjadi bingkai kerja ilmu tersebut.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Khursyid, dalam M. Umar Chapra, *What is Islamic Economics*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islami Development Bank, 1996.
- Anwar, Syamsul, *Menggagas Paradigma Epistemologi Keilmuan Fakultas Syariah dalam Bingkai UIN*, Makalah, Seminar Sehari Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hotel Saphir, 26 Maret 2005.
- Daulay, Saleh Partaonan, “Mempertegas Posisi Ekonomi Islam diantara Ekonomi Konvensional dan Fikih Mu’amalat”, dalam <http://islamiceconomicstudy.blogspot.com/2008/10/posisi-ekonomi-islam-di-antara-ekonomi.html>, diakses tanggal 22 Agustus 2012.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Foucault, Michael, *Archeology of Knowledge and The Discourse of Language*, New York: Panthoen Books, 1972.
- Hanafi, A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Haneef, Mohamed Aslam, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Analisis Komparatif Terpilih*, terj. Suherman Rosyidi, Cet. I, Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terj. Tim IKAPI, Cet. I, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Marx, Karl dkk, *Manifesto of The Communist Party*, New York: International Publisher, 1884.
- Nienhaus, Volker, “Islamic economics: Dogma or science”, in Kay Hafez (ed.), *The Islamic world and the West*, Mary Ann Kenny (trans.), Leiden: Brill, 2000.
- Praja, Juhaya S, dalam *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah*, MSI-UII. Net-12/2/2005.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an, Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1985.
- Rahardjo, M. Dawan, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Cet. I, Yogyakarta: LSAF, 1999.

- Restivo, Sal, "Modern Science as a Social Problem", dalam <http://islamlib.com/?site=1&aid=279&cat=content&cid=11&title=sains-islam-dan-revolusi-ilmiah>, diakses tanggal 11 Oktober 2012.
- Shadr, Muhammad Baqir, *Buku Induk Ekonomi Islam*, terj. Yudi, Jakarta: Zahra Publishing House, 2008.
- Shiddiqi, M. Nejatullah, *History of Islamic Economic Thought*, London: Mansell, 1992.
- Smith, Adam, *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of The Nation (1776)*, New York: The Modern Library, t.t.
- Syam Nur, *Model Analisis Teori Sosial*, Surabaya: CV Putra Media Surabaya, 2009.
- Su'ūd, Maḥmūd Abū, *Khuṭūṭ Ra'īsīyyah fī al-Iqtisād al-Islāmiyy*, Kuwait: Maktabah al-Manār al-Islāmiyyah, 1968.
- Velasquez, Manuel G, *Business Ethics, Concepts and Cases*, New Jersey: Prentice-Hall, 1998.
- Yamani, Ahmad Zaki, al-Sharī'ah al-Khālidah wa Mushkilāt al-‘Aṣr, *Syari'at Islam yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini*, terj. Mahyuddin Syaf, Cet. I, Bandung: Ma'arif, 1974.
- Zarqa', Muhammad Anas, *Islamization of Economics: Concept and Methodology*, JKAU: Islamic Economics, Vol. 16, No. 1, 1424/2003.
- Ausaf, Ahmad dkk (ed.), *Lectures on Islamic Economics*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1992.